

BAB IV

RELEVANSI ETIKA DISKURSUS DALAM KONTEKS SOSIO-KULTURAL MASYARAKAT INDONESIA

A. Posisi Jürgen Habermas

Jürgen Habermas sedari awal sudah mentasbihkan dirinya sebagai pamong modernitas, penerus dari proyek pencerahan, sebuah megaprojek yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari tradisi-tradisi berpikir yang irasional. Sebagai seorang pembaharu, tentunya ada pelbagai hal yang diperbaharui. Ia juga mampu melampaui para pendahulunya.

Banyak modifikasi (baca: kritik-otokritik) yang dilakukan olehnya, dengan tujuan untuk menyempurnakan konstuksi teori yang ia bangun. Diantaranya adalah, berkaitan dengan ajaran Marx, bahwasanya jalan emansipasi harus dilakukan dengan cara penjungkirbalikan kepada struktur masyarakat demi terciptanya masyarakat sosialis yang dicita-citakan (masyarakat tanpa kelas). Habermas tidak lagi menggunakan model yang ditawarkan oleh Marx. Meminjam bahasa Ben Agger, hancurnya kategori Marx, mengenai refleksi diri dan komunikasi pada sisi yang lain menyebabkan Marx menolak kemungkinan kerangka teoritisnya yang nantinya akan menjadi deterministik. Habermas menempuh jalan konsensus. Dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Habermas merubah haluan pemikiran Marx dari paradigma kerja menjadi paradigma komunikasi. Karena ia berkeyakinan hanya dengan perbincangan yang rasional emansipasi dapat dilakukan.

Sebelum bergabung dengan Mazhab Frankfurt, ia telah membaca dan memahami pemikiran para pendahulunya. Para pendahulunya mengalami sikap pesimistik, mereka memandang bahwa pencerahan telah membuahkan pada rasionalitas bertujuan (rasionalitas instrumental). Rasionalitas bertujuan ini adalah menjadi sumber dari berbagai bentuk saintisme, positivisme, teknokratisme dan barbarisme gaya baru.¹

Sebagai generasi baru dari Mazhab Frankfurt, Teori kritis generasi pertama masih bernyawaan filsafat kesadaran yang menempatkan kritik pada posisi subyek pemegang kebenaran. Di sini, sang subyek kebenaran menghadapi masyarakat yang menderita kesadaran palsu. Padahal kata Habermas, posisi kritik itu sendiri tidak tanpa masalah. Adorno-Horkheimer menggugat ideologi di balik dialektika pencerahan tanpa sadar posisi ideologis mereka sendiri. Dengan kata lain, para pendahulunya kata Habermas, kurang jernih dalam memahami refleksi-diri. Mereka memahaminya sebagai sesuatu yang dilangsungkan dengan cara rasionalitas bertujuan. Oleh karena itu refleksi diri tersebut pada akhirnya akan menghasilkan kepada tercapainya pandangan yang objektif dalam membidik atau memotret sebuah objek.

Begitu juga halnya dengan konsep etikanya, ia mengkritik pada pendikotomian antara rasio teoritis dan rasio praksis. Dengan kata lain, proses pendikotomian tersebut hanya berupaya secara terus menerus guna/agar mendapatkan pemahaman secara universal akan sebuah objek. Dengan mereduksi kepada keseluruhan pemahaman manusia menjadi pengalaman indrawi saja,

¹Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi; Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Buku Baik, 2004), 84.

empirik atas dasar pencapaian pengetahuan yang objektif. Dengan kata lain, cara pandang yang seperti ini hanya melegitimasi pada dominasi dari masyarakat yang satu kepada masyarakat yang lain.

Dari uraian di atas, bahwasanya Habermas mampu menemukan jalan keluar dari kebuntuan yang dihadapi oleh para pendahulunya, dengan berpegang teguh pada cita-cita pencerahan. Bagi Habermas, irrasionalitas masyarakat modern saat ini merupakan patologi modernitas, akibat dari rasionalisasi yang terdistorsi secara sistemik oleh ekspansi negara dan kapitalisme dalam dunia kehidupan (*lebenswelt*). Begitu juga halnya dengan kemunculan post-modernisme, yang hanyalah sebuah simtom dari patologi modernitas. Cita-cita pencerahan masih bisa dilanjutkan dengan upaya merekonstruksi modernitas dengan paradigma komunitatif yang menjadi dasar dari etika diskursusnya

B. Sosio-kultural Masyarakat Indonesia

Indonesia dikenal dengan negara yang multi etnis, agama dan suku. Realitas masyarakat yang beragam ini, diyakini membawa implikasi kepada kuatnya hubungan bagi anggota masyarakat bersangkutan.

Indonesia yang terdiri dari beragam aspek budaya merupakan modal sosial yang harus diramu dan ditumbuh-kembangkan. Realitas ini seharusnya dapat menumbuhkan kesadaran akan perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Beragam perbedaan ini jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik, kasus Papua misalnya, dalam kasus ini dapat dilihat bagaimana beroperasinya kebijakan yang tidak memihak pada masyarakat setempat, melainkan hanya mementingkan pada kepentingan elit belaka. Oleh karena, dilain

pihak diperlukan adanya dialog dalam ruang kehidupan yang sangat terbuka ini guna menyelesaikan beragam persoalan yang sedang melanda masyarakat dan negara kita.

Begitu juga halnya dengan letak geografis negara Indonesia, yang diapit oleh dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan dua benua, yaitu, benua Asia dan benua Australia. Tak heran kiranya, jika negara Indonesia menjadi tempat dari berjumpaan dari beragam budaya, agama.

Ungkapan sosio-kultural, memiliki konotasi tertentu yang kurang lebih mengandung pengertian tentang berbagai hal yang kaitannya dengan tradisi, adat-kebiasaan, kesenian bahkan hal-hal yang bersifat magis dan mitologis.

Menurut Azyumardi Azra, sistem budaya Indonesia pada dasarnya mengandung empat unsur, yaitu, etnis, budaya agama, budaya nasional dan budaya asing (Barat). Dan dari setiap unsur dari empat unsur tersebut mempunyai sistem norma, nilai-nilai dan karakternya sendiri. Akan tetapi pada tingkat individu, seseorang dapat menganut dan menyakini beberapa sistem budaya sekaligus. Dan tentu saja tidak semua budaya bisa bertemu sepenuhnya dalam setiap individu, karena di antara budaya-budaya ini pastinya terdapat ketidaksesuaian (*incompability*).²

Dengan demikian, kita tahu bahwasanya Indonesia didirikan dengan berbagai macam ikatan primordial yang berbeda dengan tujuan dan tekad untuk bersatu melalui kesepakatan para pendirinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Clifford Geertz, adalah ikatan asal yang terdiri dari agama, ras, suku, daerah dan

²Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara* (Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS), 39-41.

bahasa. Kekuatan pengikat inilah yang menjadi basis kejiwaan yang nantinya dapat melahirkan satu komitmen untuk selalu bersatu dalam kebhinekaan.

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendiri republik ini sepakat untuk meletakkan fondasi kesamaan nasib dan kesamaan cita-cita. Dengan bertitik tolak pada nasib yang sama, terjalinlah ikatan emosional dan moral yang kuat yang nantinya disebut sebagai persadaraan sebagai bangsa. Dengan cita-cita yang sama, maka terbentuklah solidaritas untuk menggalang guna mengejar kemajuan, Dan mengambil unsur yang baik dari berbagai konsep yang semula saling bertentangan menjadi satu konsep yang integratif, sehingga nantinya menjadi pedoman yang menampung berbagai keinginan yang semula berbeda menjadi harmonis.

Sosio-kultural yang ada seharusnya menjadi modal dalam proses pembangunan masyarakat Indonesia. Tanpa berlandaskan pada sosio-kultural yang ada kita akan menghadapi proses pembangunan yang tidak sesuai dengan realitas.

Pluralitas dalam berbagai sektor ini dapat berarti positif jikalau kita dapat meramunya dengan baik. Adanya saling pengertian dan kepercayaan antar sesama elemen yang ada di dalamnya dapat mengawal akan terjadinya kendasaran keragaman tersebut. Begitu juga halnya ketika kita tidak dapat menyadari akan keberagaman yang ada.

C. Relevansi Etika Diskursus Jürgen Habermas dalam Konteks Sosio-kultural Masyarakat Indonesia

Pada hakikatnya yang menjadi perhatian dari etika diskursus bukan hanya terciptanya stabilitas sosial, tanpa adanya klaim (*truth claim*) dan penafian terhadap adanya perbedaan. tetapi juga hendak memastikan akan terjaminnya akses dan kesempatan yang sama bagi setiap individu masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan keadilan sosial.

Indonesia, meminjam istilah Vaclav Havel, adalah negara yang masyarakatnya sedang berada pada posisi pasca-totaliter. Perkembangan dunia, yang ditandai dengan kemajuan sains, teknologi, ekonomi, pendidikan dan perkembangan politik global – disatu pihak mesti memunculkan banyak persoalan yang kemudian berimbas pada tatanan kehidupan masyarakat kita (baca: Indonesia). Pada sisi yang lain para pemilik modal, semakin mempererat cengkramannya dalam memonopoli ekonomi, begitu juga para politisi sama-sama berebut pengaruh dan legitimasi. Sementara rakyat miskin semakin bergulat dengan kemiskinannya dan selalu dihantui dengan penggusuran.

Beberapa fenomena di atas merupakan dampak langsung dari globalisasi. Namun demikian, perlu disadari bahwa terbentuknya negara dan bangsa Indonesia sebenarnya karena adanya keberagaman atau kemajemukan, budaya, agama dan etnis itu sendiri. Heterogenitas dari barbagai unsur dalam negara kesatuan Indonesia inilah, yang sebenarnya sebagai kekayaan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya.

Namun demikian, realitas tentang kemajemukan bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada era globalisasi, di mana segala aspek kehidupan tidak terlepas dari kepentingan politik global. Hanya saja sejumlah ahli menyadari bahwa globalisasi yang sebenarnya sebagai anak kandung dari modernistas ini, ternyata tidak dapat membantu terhadap negara yang sedang berkembang ini.

Istilah globalisasi merupakan istilah yang sangat populer, pada saat ini istilah ini banyak diperbincangkan dalam ruang politik, bahkan dalam ruang perkuliahan. Namun bukan berarti pemaknaan akan globalisasi juga menjadi jelas. Di tingkat akademik pemaknaan akan globalisasi telah menghasilkan beragam pengertian, diantaranya adalah, seperti pemaknaan A. Giddens bahwa globalisasi merupakan suatu proses intensifikasi relasi-relasi sosial seluas dunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas berjauhan, sehingga peristiwa di satu tempat dapat di tentukan oleh peristiwa lain yang terjadi bermil-mil jaraknya.

R. O Keohane dan Josep S. Nye melihat globalisasi sebagai sebuah proses meningkatnya jejaring interdependensi antar umat manusia pada tataran benua-benua.

Dari pendefinisian di atas dapat dipahami, bahwa globalisasi merupakan sebuah proses ketergantungan pada tingkat global yang nantinya mengakibatkan dunia seolah-olah semakin sempit. Atau dengan perkataan lain, globalisasi merupakan suatu proses saling ketergantungan antar negara dan masyarakat. Salah satu bentuk dari proses globalisasi yang mendera hampir seluruh umat manusia ini, adalah melalui proses penyatuan produksi kapital dan transformasi budaya yang melampaui batas geografis dan negara. Proses yang demikian adalah terjadi

Akibat kemajuan dan perkembangan di bidang teknologi, khususnya dalam bidang teknologi transportasi dan informasi/komunikasi.³

Proses yang demikian ini ternyata bukan hanya menyebabkan kesadaran untuk mempertanyakan suatu identitas, tetapi juga telah memunculkan keinginan untuk mempertahankan identitas. realitas yang paradoksal inilah yang telah mengiringi kita pada penciptaan wacana baru, yaitu wacana tentang identitas budaya. Sebuah identitas yang dibangun melalui pergulatan dan ketengangan dalam menentukan pilihan dan komunitas. Sementara pada sisi yang lain memaksa kita untuk masuk dalam percaturan internasional yang menepis batas-batas geografis, batas-batas etnis, batas-batas bangsa, dan identitas budaya.

Pada tataran inilah yang seharusnya kita berupaya untuk kembali dan menilik untuk mengembangkan modal sosial yang kita miliki. Karena modal sosial inilah yang sebenarnya menjadi landasan pijak dalam menggapai masa depan yang lebih baik.

Saat ini, setidaknya kita telah memiliki sejumlah modal sosial yang seharusnya ditumbuh kembangkan oleh masyarakat Indonesia. Diantaranya adalah:

Pertama, sikap keberagaman, kesadaran akan perbedaan sudah terbangun sedari dulu dalam konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia. Kesadaran akan subjek yang lain sepenuhnya harus dipahami bahwasanya antara subjek yang satu dengan yang lainnya harus saling menghargai dan menghormati. Sikap

³Ander Ata Ujan dkk, *Multikulturalisme; Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan* (Jakarta: PT MALTA PARTINDO), 7-8.

menjunjung tinggi yang lain, harus ditumbuh kembangkan guna menjaga pluralitas masyarakat yang ada dalam masyarakat kita.

Kedua, kalau kita mengamati secara cermat keberadaan beragam komunitas dalam masyarakat kita, bahwasanya sistem sosial yang membentuk dalam masyarakat kita adalah berangkat dari semangat individu menjadi sosok sosial. Dengan kata lain, masyarakat kita sedari dulu mempunyai semangat kebersamaan atau kolektivisme. Ketika dalam menghadapi persoalan misalnya, model penyelesaiannya dibingkai dalam sebuah forum dialogis guna mencapai mufakat antara subjek yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, jika terdapat perbedaan dalam masyarakat kita, maka musyawarah merupakan medium yang dilakukan untuk memecahkan kebuntuan tersebut. Karakter kerakyatan dan jiwa sosial sudah merupakan karakter bangsa Indonesia. Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan yang bersifat deliberatif.

Ketiga, masyarakat kita merupakan masyarakat yang religius, dalam keseharian mereka taat menjalankan ibadah agamanya. Secara kolektif, mereka juga mengaktualisasi diri ke dalam kegiatan budaya yang bernuansa keagamaan, dan hal ini mendapatkan pendasarannya pada landasan ideologis yang kita miliki.

Namun demikian, perlu disadari bahwa disamping kita memiliki modal sosial yang harus ditumbuh kembangkan, tentunya pada saat ini juga terdapat hambatan yang nantinya akan mengganggu dalam proses pengembangan modal sosial tersebut.

Salah satu bentuk konkret dari hambatan tersebut adalah adanya goncangan-goncangan sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari

proses globalisasi dalam masyarakat yang pluralistik. Begitu juga, adanya konflik-konflik yang merebak di berbagai daerah sebagai akibat dari perbedaan etnis, agama dan budaya.

Fenomena inilah yang disebut dengan sikap eksklusif. Di mana ketika masing-masing kalangan merasa bahwa agama dan budayanya sebagai yang paling benar, maka yang lain harus disingkirkan. Hal ini tak jarang menjadi benih konflik yang selalu mengancam kesatuan bangsa. belum lagi semangat individualistik sudah mulai menjangkiti masyarakat kita, pemenuhan akan kepuasan diri dan abai akan yang lain. Persoalan ini semakin mengkrystal dalam realitas masyarakat kita. Sikap tanpa pamrih jarang lagi kita temukan dalam realitas masyarakat kita. Cara hidup yang selalu diciptakan oleh imaji, digerakkan oleh imaji, dibentuk oleh imaji, bahkan dirayakan melauai imaji. Dengan imaji masyarakat kita memahami dan membentuk dirinya, saat ini konstruksi sosial masyarakat kita terletak pada dunia citraan yang lebih banyak bersifat konsumeris dan berdampak pada sikap yang hedonistik.

Dengan realitas masyarakat kita yang semakin terbuka (ter-globalisasi), maka upaya introduksi dan adopsi masyarakat pada nilai-nilai baru merupakan fenomena kultural yang tidak hanya mempercepat dalam upaya transformasi nilai sosial, tetapi juga merupakan tantangan sosial sekaligus. Realitas inilah yang juga telah menyebabkan dampak negatif terhadap beragam aspek kehidupan. Termasuk di dalamnya aspek sosial, budaya dan politik.

Oleh karenanya, maka tidak bisa disangkal bahwa derasnya hembusan globalisasi ternyata telah merusak sendi-sendi budaya lokal ke-Indonesia-an.

Begitu juga halnya dengan maraknya beragam konflik yang bermoduskan agama. Seperti terjadinya ketegangan antara yang berpikiran radikal dengan yang berpikiran liberal.

Dalam konteks etika diskursus, sebenarnya Persoalan ini lebih banyak disebabkan oleh karena diantara keduanya lebih mementingkan dan didominasi oleh ego dan kelompoknya masing-masing. Sehingga diantara keduanya terdapat kebuntuan komunikasi (distorsi komunikasi). Begitu juga halnya konflik yang terjadi antar individu atau kelompok dalam lintas agama, seperti terjadinya ketegangan antara umat Kristen dan umat Islam beberapa tahun yang lalu. Ketegangan seperti ini tentunya sangat mengancam keutuhan (integrasi) negara dan bangsa Indonesia. Pada konteks inilah, etika diskursus Jürgen Habermas menemukan relevansinya.

Urgensitas dari etika diskursus Jürgen Habermas adalah dalam kerangka menjamin terciptanya komunikasi yang bebas dalam mengakses beragam kepentingan guna tercapainya keadilan sosial. Ini artinya, bahwa etika diskursus adalah satu upaya untuk menciptakan kondisi komunikasi yang menjamin kepada sifat umum akan norma-norma yang dapat diterima secara bersama-sama.

Hanya saja, satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa Masyarakat yang multikultur menurut Habermas memerlukan sebuah etika (yang harus) bersifat universal. Untuk mencapai etika yang bersifat universal itu diperlukan kesepakatan sebagai dasar bersama. Kesepahaman atau kesepakatan bersama (konsensus) itu hanya bisa dicapai melalui jalur komunikasi. Di sini Habermas

menganjurkan sebuah jalan keluar melalui teori tindakan komunikatif yang kemudian menjadi basis pendasaran dari etika diskursusnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa etika diskursus pada dasarnya di samping sebagai usaha untuk mengantisipasi akan terjadinya disintegrasi masyarakat akibat adanya acuan dari beragam nilai maupun keyakinan yang berbeda, etika diskursus juga dimaksudkan dalam kerangka mencari keseimbangan antara menghargai keunikan individu dan tuntutan untuk menciptakan kebersamaan yang substantif.

Senada dengan di atas, dalam konteks sosial-keislaman, konstruksi aksiologis dari etika diskursus adalah mengambil bentuk forum musyawarah yang didasari dengan sikap kebersamaan kepentingan dalam setiap individu. Pembentukan forum musyawarah dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an adalah lebih menekankan pada pencarian nilai-nilai kebersamaan (titik temu) yang mungkin akan dilakukan. Dengan ditemukannya nilai-nilai kebersamaan secara universal inilah-sebagaimana yang juga dimaksudkan al-Qur'an, adalah diorientasikan dalam rangka terciptanya tanggungjawab dan kebersamaan antar setiap peserta diskursus.

Tentu suasana atau iklim dari musyawarah yang dimaksud oleh al-Qur'an harus dikondisikan agar rasa tanggungjawab tersebut terbangun. Implimentasinya adalah sebuah keharusan untuk menciptakan sistem sosial-politik yang adil, yang memungkinkan akan adanya rekrutmen dan partisipasi dari setiap warga negara secara setara tanpa diskriminasi, baik dalam proses pengambilan keputusan politik

maupun ikut andil dalam pengelolaan lembaga-lembaga politik. Dalam al-Qur'an dijelaskan dalam Surat Al-Imran 3: 159 yang artinya:

"maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri sekelilingmu. Karena itu, ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (politik, ekonomi, dan kemasyarakatan). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya".

Dalam surat di atas dijelaskan tentang pentingnya untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan pelbagai persoalan yang kita hadapi. Karena musyawarah merupakan sarana mempertemukan kepentingan yang bersifat personal (*juz'i*) dan kolektif (*kulli*). Musyawarah juga merupakan media komunikasi sosial, karena dalam musyawarah menunjukkan adanya kebutuhan sosial yang lebih luas. Begitu juga halnya Penciptaan iklim musyawarah harus diorientasikan pada terjaminnya kebebasan dalam mengajukan pendapat. Dengan kata lain, *syura* (musyawarah) yang diperkenalkan oleh al-Qur'an sebagai prototipe sistem sosial-politik yang terbuka, egaliter dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan agar dikembangkan dalam rangka untuk mengelola kehidupan bersama di tengah perbedaan dan orientasi sosial dari kelompok-kelompok warga negara yang berbeda-beda. Karena jika sistem sosial-politik yang dibangun secara diskriminatif hanya akan menyulut kepada konflik yang tidak akan kunjung usai (berkepanjangan).